



**PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR**  
Jalan Dahlia No. 04 Telepon (0622) 23541  
PEMATANG SIANTAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR**

Nomor : 800.1.11.1/936/Dinsos P3A/III/2023

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANWAL RENCANA KERJA (RENJA)**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2024 perlu pembentukan Tim Penyusunan Ranwal Rencana Kerja
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Ranwal Rencana Kerja (Renja) di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar.

**MENINGGAT**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang – Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJDP ) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar tentang Pembentukan Tim Penyusun Ranwal Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024
- KESATU** : Mengesahkan Tim Penyusun Ranwal Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Ranwal Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen rencana kerja Tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar  
Pada Tanggal : 04 Maret 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PEMATANG SIANTAR



**PARIAMAN SILAEN, SH**  
**PEMUDA UTAMA MUDA**  
NIP. 196409221990031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR : 800.1.11.1/436/Dinsos P3A/III/2023  
TANGGAL : 01 Maret 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANWAJ RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4.	Anggota	1. Kabid Rehabosos dan Pemberdayaan Sosial 2. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Kabid Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak 4. Penyuluh Sosial Ahli Madya ( Arifin Sagata,SH) 5. Penyuluh Sosial Ahli Madya ( Drs.Dahlan Sinaga) 6. Penyuluh Sosial Ahli Muda ( Fatmawati,SH) 7. Penyuluh Sosial Ahli Muda ( Krestinee Simanpor,SE) 8. Penyuluh Sosial Ahli Muda ( Muhammad Novrizal,STh.I) 9. Penyuluh Sosial Ahli Muda (Dirgahayu P.H Simanjuntak, SE,MM ) 10. Penyuluh Sosial Ahli Muda ( Erwanto ) 11. Penyuluh Sosial Ahli Muda ( Jan Wilson W Purba,SE) 12. Penyuluh Sosial Ahli Muda ( Resdon Simanollang,SH) 13. Penyuluh Sosial Ahli Muda (Anna H. Halobo) 14. Penyuluh Sosial Ahli Muda ( Karolina,S.Sos)

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR



**PARIAMAN SILAEN, SH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 198409221990031001



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PEMATANG SIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nya kami dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun mengacu kepada Renstra Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kondisi tahun ini dan tahun tahun yang akan datang masih diyakini dapat dilaksanakan dengan dukungan maksimal dari Instansi terkait dan Mitra Kerja lainnya.

Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih berhasil guna dan dapat di pertanggung jawabkan karena semua Kebijakan, Program, Sasaran, dan Kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Rencana Strategis.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik, menghasilkan dokumen Rencana Strategis yang bermakna dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar pada tahun 2024, kami sampaikan terima kasih.

Pematang Siantar, 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pematang Siantar



MHD HAMDANI LUBIS, SH

PEMBINA  
NIP. 197910272000031002

## DAFTAR ISI

Hal

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b> .....	
	1.1 Latar Belakang .....	
	1.2 Landasan Hukum .....	
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	
	1.4 Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II</b>	<b>: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	
<b>BAB III</b>	<b>: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	
	3.3 Program dan Kegiatan .....	
<b>BAB IV</b>	<b>: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b> .....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dan penyusunannya berpedoman pada RKPD Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar. Oleh karena itu pemerintah Kota Pematang Siantar dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh organisasi Perangkat Daerah (ODP) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pemerintah Kota Pematang Siantar telah menetapkan rencana Pembangunan jangka Menengah yang mengacu kepada mekanisme perencanaan nasional. Rencana kerja ini merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dan rencana strategis yang sifatnya lebih detail dalam rangka menghasilkan perencanaan yang sistematis dan konsisten, menyusun dan merumuskan strategi yang mengarah pada pencapaian program jangka panjang, jangka menengah dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan rencana yang lebih terukur dengan mengorganisasikan secara sistematis untuk mencapai tujuan, mengukur secara rinci kinerja dan umpan balik yang dihasilkan dengan logis, terorganisasi dan sistematis.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar membuat Rencana Kerja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahunan tersebut.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
12. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar
13. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar ;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Nomor 560/353/Dinsos/VII/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar adalah untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Dokumen yang disusun ini sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar tahun 2024 dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara bidang serta efisien alokasi berbagai sumber daya yang ada, sehingga dokumen

bagi pemangku kepentingan yang berhubungan erat dengan pencapaian kinerja.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mempermudah pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan. Secara sistematis dapat digambarkan tentang tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2024;
3. Optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis perangkat daerah
4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra serta faktor pendukung dan penghambat tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penting untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang.

Target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

**TABEL T.C. 29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERAKOKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERAKOKAT DAERAH S/D TAHUN 2023**  
**KOTA PEMATANG SIANTAR**

**SAMA PERAKOKAT DAERAH: DIMAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLENGKAPAN ANAK**

Kode	Uraian/Bidang Urusan Penyelenggaraan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outputmes) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2023-2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keberhasilan Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lain (a-d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kegiatan/Program/Target Tahun 2023)	Pencapaian Realisasi Capaian target Rencana PD s/d tahun berjalan	
					Target Rencana PD tahun 2023	Realisasi Kinerja PD tahun 2023	Tugas Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (b-c)	Tugas Capaian Realisasi Target Rencana PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>									
1.06.02.2.03	Pengembangan Program Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab./Kota	Persentase FMS (Pitroad) Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	70 %	0	80 %	0	80%	0	0	0
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Pemula Pekerja Sosial Masyarakat Kesejahteraan Kab./Kota	Persentase Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab./Kota	100 %	0	100 %	0	100%	0	0	0
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat Kesejahteraan Kab./Kota	Jumlah Orang yang dilatih / Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial masyarakat Kesejahteraan Kabupaten/Kota	33 orang	0	33 orang	0	33 orang	0	0	0
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kesejahteraan Kab./Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kesejahteraan Kab./Kota yang mengikuti Kapasitas pengembangan Kabupaten/Kota	239 orang	0	239 orang	0	239 orang	0	0	0
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>									
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Peningkatan Kualitas Terlewat, Anak Terlantar, Lanjut Usia, serta gangguan perilaku di luar rentis sosial	Persentase Capaian SPN Bidang Sosial	100 %	0	100 %	0	100%	0	0	0
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Peningkatan Kualitas Terlewat, Anak Terlantar, Lanjut Usia, serta gangguan perilaku di luar rentis sosial	Persentase penugasan Rehabilitasi Sosial Dasar Peningkatan Kualitas Terlewat, Anak Terlantar, Lanjut Usia, serta gangguan perilaku di luar rentis sosial	100 %	0	100 %	0	100%	0	0	0

1	06/04	2.01	01	Pendidikan Pemukiman	Jumlah Orang yang memperoleh Pemukiman Melibatkan Perumahan sesuai dengan standar gis minimal Keseluruhan Kabupaten/Kota	610 orang	0	0	0	610 Orang	0	0
1	06/04	2.01	02	Penyediaan Ruang	Jumlah Orang yang memiliki Paksi dan kedergajaan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Keseluruhan Kabupaten/Kota	610 orang	0	0	0	610 Orang	0	0
1	06/04	2.01	03	Penyediaan Asat Bantu	Jumlah Orang yang memperoleh Asat Bantu dan Asat Bantu Praga sesuai kebutuhan Keseluruhan Kabupaten/Kota	40 orang	0	0	0	40 Orang	0	0
1	06/04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Keluarga Keseluruhan Kabupaten/Kota	10 orang	0	0	0	10 Orang	0	0
1	06/04	2.01	05	Pemberian Bantuan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penerima bantuan Sakit-membantu dari awal Keseluruhan Kabupaten/Kota	610 orang	0	0	0	610 Orang	0	0
1	06/04	2.01	06	Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terutama Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Serna, Gelandangan, Program, dan Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terutama Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Program dan Masyarakat Keseluruhan Kabupaten/Kota	610 orang	0	0	0	610 Orang	0	0
1	06/04	2.01	07	Fasilitas Pelayanan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang memenuhi kebutuhan pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Keseluruhan Kabupaten/Kota	5 orang	0	0	0	5 Orang	0	0
1	06/04	2.01	08	Pembinaan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Keseluruhan Kabupaten/Kota	25 orang	0	0	0	25 Orang	0	0
1	06/04	2.01	09	Pemberian Layanan Dasar dan Pengalihan	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Dasar dan Pengalihan Keseluruhan Kabupaten/Kota	50 orang	0	0	0	50 Orang	0	0
1	06/04	2.01	10	Pemberian Layanan Kesehatan	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Keseluruhan Kabupaten/Kota	50 orang	0	0	0	50 Orang	0	0

1	06/04	2/01	13	Pembinaan Layanan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Pemeliharaan kesehatan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	30 orang	0	0	0	0	0	0	0	0
1	06/04	2/01	12	Pembinaan Layanan Poliatkan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Poliaktif Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	4 orang	0	0	0	0	0	0	0	0
1	04/08			<b>PROGRAM PEBERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Presentase Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Peserta/Berlindung Sosial</b>	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
1	06/06	2/02		Pengukuran data ipik miskin sakit-pati daerah Kab/ Kota	Persentase Capaian Pengolahan data ipik miskin kabupaten daerah Kab/ Kota	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
1	06/05	2/02	01	Pendidikan Pabrik Mekanik Cakupan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Pabrik Mekanik Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang aktif	19.17%	0	0	0	0	0	0	0	0
1	06/05	2/02	02	Pengukuran Data Pabrik Mekanik Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelangka yang mendapatkan pengurangan Pajak Mekanik Cakupan Kabupaten/Kota	120	Kelangka	0	0	0	0	0	0	0
1	06/05	2/02	03	Penataan Bantuan Sosial Kewarganegaraan Kelangka	Jumlah Kelangka Peserta Makan (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kewarganegaraan Kelangka	66	Kelangka	0	0	0	0	0	0	0
1	04/08			<b>PROGRAM PERANGKAS BERKASA</b>	<b>Persentase Terkena Bantuan yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat</b>	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
1	06/06	2/01		Perindungan Sosial Klien Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perindungan Sosial Klien Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
1	06/06	2/01	01	Pendidikan Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan Pendidikan (di luar dalam Masa Tanggap Darurat) (Pengiriman) Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	120	Orang	0	0	0	0	0	0	0
1	06/06	2/01	02	Pendidikan Balitbang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kebutuhan Lainnya yang tersebut pada Masa Tanggap Darurat (Pengiriman) dan Pasca Bencana Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	30	Orang	0	0	0	0	0	0	0
1	06/06	2/01	03	Penyediaan Tempat Pembungkahan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	1	Unit	0	0	0	0	0	0	0

1	06/06	2/01/04	Peningkatan Kualitas bagi Keliyahi Banteh	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan Khawir bagi Keliyahi Banteh Kecamatan Kabupaten/Kota	8	Orang	0	0	0	8 Orang	0	0
1	06/06	2/01/05	Pelayanan Dukungan (Pelayanan)	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikologis Kecamatan Kabupaten/Kota	10	Orang	0	0	0	10 Orang	0	0
1	06/06	2/02	Pengorganisasian Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Keselamatan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Keselamatan Bencana Kabupaten/Kota	100	%	0	0	0	100%	0	0
1	06/06	2/02/02	Koordinasi, Stabilitas dan Pelaksanaan Timpa Slaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Stabilitas dan Pelaksanaan Timpa Slaga Bencana Kecamatan Kabupaten/Kota	24	Orang	0	0	0	24 Orang	0	0
1	06/07		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	06/07	2/01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100	%	0	0	0	100%	0	0
1	06/07	2/01	Rehabilitasi Struktur dan Prasana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Mandi Reabilitasi serta Pemeliharaan Struktur dan Prasana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Dukun an	0	0	0	1 Dukunan	0	0
1	06/07	2/01/03	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang diperbaiki/pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	888	Makam	0	0	0	888 Makam	0	0
2	08/03		<b>PROGRAM PENGARUH TARIK GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEMERPUAN</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>37,90</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,85 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	08/03	2/01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kecamatan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kecamatan Kabupaten/Kota	100	%	0	0	0	100%	0	0



2	08/02	2.01	03	Aktivasi Entitas dan Peningkatan Pelaksanaan PUJ termasuk PPRD	Jumlah Peringkat Daerah yang meraih Adiklat Keluasan dan Peningkatan Pelaksanaan Pengorganisasian Gender (PUJ) termasuk Peningkatan Pelaksanaan Bepolus Gender (PPBG) Kecamatan Kabupaten/Kota	33	OPD	0	84	OPD	0	84	100%	0	3	4	
2	08/02	2.01	04	Realisasi Kebijakan Pelaksanaan PUJ termasuk PPRD	Jumlah Peringkat Daerah yang meraih Subkelas Keluasan Pelaksanaan Pengorganisasian Gender (PUJ) termasuk Peningkatan Pelaksanaan Responsif Gender (PRPD) Kecamatan Kabupaten/Kota	33	OPD	0	83	OPD	0	83	100%	0	3	3	
2	08/02	2.02	01	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan Kabupaten/Kota	Persentase Pembentukan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kecamatan Kabupaten/Kota	100	%	0	100	%	0	0	100%	0	3	3	
2	08/02	2.02	01	Sosialisasi Peringatan Participatory Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peringatan Partisipatif Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kecamatan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	1	Dokumen	0	0	1	Dokumen	0	3	3
2	08/02	2.03	01	Pengisian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pembelajaran Perempuan	Persentase Pengisian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pembelajaran Perempuan Kecamatan Kabupaten/Kota	100	%	0	100	%	0	0	100%	0	6	6	
2	08/02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pembelajaran Perempuan Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pembelajaran Perempuan Kecamatan Kabupaten/Kota yang mendapat Adiklat dan Peningkatan	20	Lembar	0	20	Lembar	0	0	20	Lembar	3	7	
2	08/02	2.03	06	Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (KEK) Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunitas Informasi dan Kelas (KIE) Pembinaan Perempuan Kecamatan Kabupaten/Kota yang terdapat yang terdapat	12	Dokumen	0	12	Dokumen	0	0	12	Dokumen	0	6	6
2	08/03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	08-03	2.01	Perencanaan Kemandirian (berbagai Perencanaan Langkah Darurat Kabupaten/Kota)	Perencanaan Perencanaan Kemandirian (berbagai Perencanaan Langkah Darurat Kabupaten/Kota)	100 %	0	0	0	0	100%	0	0	
2	08-03	2.01-01	Kemampuan dan keterampilan Pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kegiatan Perencanaan (berbagai Perencanaan Langkah Darurat Kabupaten/Kota)	Jumlah Dibayar Hasil (Kualitas dan Substansi) Pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kegiatan Perencanaan (berbagai Perencanaan Langkah Darurat Kabupaten/Kota)	1	Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
3	04-04	2.01	<b>PROGRAM PERINGKIHAN KUALITAS MELAKUKAKAN</b>	<b>Cakupan Layanan Kesehatan Keluarga</b>	100 %	0	0	0	0	100%	0	0	0
2	08-04	2.01	Perencanaan Kualitas Keluarga dalam Mengetahui Kesehatan (K0) dan Hak Anak (tingkat daerah Kab/ Kota)	Perencanaan Perencanaan Kualitas Keluarga dalam Mengetahui Kesehatan (K0) dan Hak Anak (tingkat daerah Kab/ Kota)	100 %	0	0	0	0	100%	0	0	0
3	08-04	2.01-03	Perencanaan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga (kemandirian Kab/ Kota)	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga (kemandirian Kabupaten/Kota)	42	Laporan	0	0	0	42 Laporan	0	0	0
3	08-04	2.01-02	<b>PROGRAM PERENCANAAN HAK ANAK</b>	<b>Perencanaan Keluarga Rumah Anak</b>	100 %	0	0	0	0	100%	0	0	0
3	08-05	2.01	Perencanaan PMA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha (kemandirian Kab/ Kota)	Perencanaan Perencanaan PMA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha (kemandirian Kab/ Kota)	100 %	0	0	0	0	100%	0	0	0
2	08-06	2.01-02	Kemampuan dan keterampilan Perencanaan Perencanaan Hak Anak (kemandirian Kab/ Kota)	Jumlah Dokumen Hasil (Kualitas dan Substansi) Perencanaan Perencanaan Hak Anak (kemandirian Kabupaten/Kota)	1	Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	0	0
2	08-06	2.02	Perencanaan dan Perencanaan Lembaga Perencanaan Layanan Perencanaan Kualitas Hidup Anak (kemandirian Kab/ Kota)	Perencanaan Perencanaan dan Perencanaan Layanan Perencanaan Kualitas Hidup Anak (kemandirian Kab/ Kota)	100 %	0	0	0	0	100%	0	0	0
3	08-06	2.02-01	Perencanaan Layanan Perencanaan Kualitas Hidup Anak (kemandirian Kab/ Kota)	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Perencanaan Kualitas Hidup Anak (kemandirian Kabupaten/Kota)	47	orang	0	0	0	47 Orang	0	0	0
3	08-06	2.02-02	Kemampuan dan keterampilan Perencanaan Perencanaan Kualitas Hidup Anak (tingkat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil (Kualitas dan Substansi) Perencanaan Perencanaan Kualitas Hidup Anak (tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	12	Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	0	0	0

2	06	06	3	02	03	Koordinasi dan Bekerjasama Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan Head Kordinator dan Bekerjasama Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kecamatan Kabupaten/Kota	1	Dukungan	0	0	0	1	Dukungan	0	0	0	0
2	08	07				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KIRIBUS ANAK</b>	<b>Perawatan Penderitaan Korban anak yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota</b>	100	%	0	0	0	100	%	0	0	0	0
2	08	07	3	01		Perawatan Korban korban anak yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota	Perawatan Penderitaan Korban anak yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota	100	%	0	0	0	100	%	0	0	0	0
2	08	07	2	01	03	Koordinasi dan Bekerjasama Peningkatan Kualitas Hidup Anak terhadap Anak Kecamatan kabupaten/kota	Jumlah Dukungan Kordinator dan Bekerjasama Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kecamatan terhadap Anak Kecamatan kabupaten/kota	6	Dukungan	0	0	0	6	Dukungan	0	0	0	0
2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus yang masyarakat Kecamatan tingkat daerah kabupaten/kota	Perawatan Layanan bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus yang masyarakat Kecamatan tingkat daerah kabupaten/kota	100	%	0	0	0	100	%	0	0	0	0
2	08	07	2	02	06	Koordinasi dan Bekerjasama Pelaksanaan Pendampingan Anak yang membutuhkan Pendampingan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan Kordinator dan Bekerjasama Pelaksanaan Pendampingan Anak yang membutuhkan Pendampingan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	1	Dukungan	0	0	0	1	Dukungan	0	0	0	0
2	08	07	2	03		Pengawasan dan Pengontrolan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengawasan dan Pengontrolan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang membutuhkan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	100	%	0	0	0	100	%	0	0	0	0
2	08	07	2	03	07	Koordinasi dan Bekerjasama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan Kordinator dan Bekerjasama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	3	Dukungan	0	0	0	3	Dukungan	0	0	0	0
1	06	01				<b>PROGRAM PENYAJUKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>RUMAH AKIP Peningkat Daerah</b>	8	8				CC	8				CC
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peningkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peningkat Daerah	100	%	0	0	0	100	%	0	0	0	0

				1. Dokumen ent	2	3. Dokumen ent	4	5. Dokumen ent	6	7. Dokumen ent	8. Dokumen ent	9	10
1	06/01	2/02		100 %	0	100 %	0	0	0	0	100%	0	0
1	06/01	2/02/01		40 orang	0	40 orang	0	0	0	0	40 Orang	0	0
1	06/01	2/06		100 %	0	100 %	0	0	0	0	100%	0	0
1	06/01	2/06/01		12 Paket	0	12 Paket	0	0	0	0	12 Paket	0	0
1	06/01	2/06/02		12 Paket	0	12 Paket	0	0	0	0	12 Paket	0	0
1	06/01	2/06/03		12 Paket	0	12 Paket	0	0	0	0	12 Paket	0	0
1	06/01	2/06/04		12 Paket	0	12 Paket	0	0	0	0	12 Paket	0	0
1	06/01	2/06/05		12 12	0	12 12	0	0	0	0	12 Paket	0	0
1	06/01	2/06/09		95 Laporan	0	95 Laporan	0	0	0	0	95 Laporan	0	0
				12 Dokumen ent	0	12 Dokumen ent	0	0	0	0	12 Dokumen ent	0	0
1	06/01	2/07		100 %	0	100 %	0	0	0	0	100%	0	0
1	06/01	2/07/05		3 Usul	0	3 Usul	0	0	0	0	3 Usul	0	0
1	06/01	2/08		100 %	0	100 %	0	0	0	0	100%	0	0

1	06-01-2.08-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Instalasi Dapur Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Instalasi Dapur Air dan Listrik yang diterbitkan	0	12	Laporan	0	12	Laporan	0	0
1	06-01-2.08-04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diterbitkan	3	12	Laporan	0	12	Laporan	3	0
1	06-01-2.09	Pembinaan Bidang Milk Daerah Tingkat I/Provinsi Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pembinaan Bidang Milk Daerah Tingkat I/Provinsi Pemerintahan Daerah	0	100	%	0	100%		0	0
1	06-01-2.09-01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran, Persewaan Denda Jilid, Kenderaan Denda Jilid	Jumlah Kenderaan Persewaan Denda atau kenderaan jilid yang dipelihara dan diparkir pagawanya	0	4	Unit	0	4	Unit	0	0
1	06-01-2.09-02	Pembayaran Perbaikan dan Biaya Listrik	Jumlah Perbaikan dan Biaya Listrik yang dipelihara	0	13	Unit	0	13	Unit	0	0

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar tahun anggaran 2023 berdampak langsung kepada masyarakat sebagai berikut :

- a. Pemberian bantuan permukiman bagi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis di luar panti sosial;
  - b. Pemberian bantuan berupa bahan pangan bagi korban bencana alam maupun sosial;
  - c. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak inflasi;
  - d. Verifikasi dan Validasi data penerima bantuan sosial;
  - e. Pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel T-C.30 sebagai berikut :

TABEL T-C. 30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR**

NO	Indikator	SPK/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Rencana Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Akhir
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase penurunan PPK3/PM3I			-	0,03%	0,05%	0,06%	-	0,03%	0,05%	0,06%	
2.	Persentase capaian SPM Bidang Sosial			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Persentase Penyandang Disabilitas (rentan, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti)	SPM BIDANG SOSIAL		-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	Indeks Pembangunan Gender		IKK	-	96%	96,15%	96,30%	-	96%	96,15%	96,30%	
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja Langsung APBD		IKK	-	35,85%	36%	36,50%	-	35,85%	36%	36,50%	
5	Persentase anak korban kekerasan yang dirangai		IKK	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
6	Persentase korban kekerasan Perempuan yang mendapat layanan		IKK	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
7	Persentase korban kekerasan Anak yang mendapat layanan		IKK	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Adapun isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan dimasa mendatang.

Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu layanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial pada Permendagri No.59 Tahun 202 yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu penting pada urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu :

1. Belum optimalnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);
2. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Pematang Siantar;
3. Belum optimalnya tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan target kinerja beserta rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun 2024 berpedoman kepada kerangka perencanaan strategis dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Pada dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2024, data yang digurukan adalah data perencanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2027. Ekstraksi data rencana kegiatan, pagu indikatif maupun target kinerja tahun 2024 pada dokumen



tersebut merupakan asumsi awal perencanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut:

**TABEL T-C. 31**  
**REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**KOTA PEMAYANG BUNTAR**  
**KAMA OPD : DINAS SOSIAL PEMBENDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	Masyarakat Awal RKPD				Masyarakat Substansial				Garis Pembatas												
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Program/ Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian		Page Indikatorif (Rp.000)	Page Indikatorif (Rp.000)										
1	<b>PROGRAM PEMBENDAYAAN SOSIAL</b>	3	3	3	32%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100 %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kota	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100 %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kota	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100 %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kota	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100 %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kota	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100 %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kota
2	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	3	3	3	100 %	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100 %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kota	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100 %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kota	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100 %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kota	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100 %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kota	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100 %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kota

Proyeksi Anggaran	Dinas PIA	Jumlah Orang yang menerima Pelayanan dan keberagaman bahasa yang tersedia dalam 1 Tahun Keresnagan Kabupaten/Kota	410 Orang	184.800.000	Penyediaan Bimbingan	Dinas PIA	Jumlah Orang yang menerima Pelayanan dan keberagaman bahasa yang tersedia dalam 1 Tahun Keresnagan Kabupaten/Kota	250 Orang	183.000.000
Proyeksi Alat Bantu	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Keresnagan Kabupaten/Kota	40 Orang	95.322.287	Proyeksi Alat Bantu	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Keresnagan Kabupaten/Kota	85 Orang	150.000.000
Pembelian Layanan Bina Sosial Keluarga	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Bina Sosial Keluarga Keresnagan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.843.000	Pembelian Layanan Bina Sosial Keluarga	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Bina Sosial Keluarga Keresnagan Kabupaten/Kota	8 Orang	7.800.000
Pembelian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terlantar, Lulus Terbatas, Serta Orphanage, Program, dan Masyarakat	Dinas PIA	Jumlah peserta bimbingan sosial dan sosial kemasyarakatan Kabupaten/Kota	610 Orang	12.120.000	Pembelian Bimbingan Sosial, Mental, Spiritual dan Sosial	Dinas PIA	Jumlah peserta bimbingan sosial Kabupaten/Kota	350 Orang	841.837.974
Pembelian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terlantar, Lulus Terbatas, Serta Orphanage, Program, dan Masyarakat	Dinas PIA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terlantar, Lulus Terbatas, Serta Orphanage, Program, dan Masyarakat Kabupaten/Kota	610 Orang	4.843.000	Pembelian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terlantar, Lulus Terbatas, Serta Orphanage, Program, dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Dinas PIA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terlantar, Lulus Terbatas, Serta Orphanage, Program, dan Masyarakat Kabupaten/Kota	30 Orang	18.000.000
Fasilitas Pembinaan Negeri Jember, Keresnagan, Mitra Kabupaten, Bina Sosial dan Mitra Herdiana Anak	Dinas PIA	Jumlah Orang yang menerima bimbingan pembinaan negeri Jember Kabupaten, Akta Kabupaten, Bina Sosial dan Mitra Herdiana Anak Kabupaten/Kota	3 Orang	1.813.000	Fasilitas Pembinaan Negeri Jember, Kabupaten, Akta Kabupaten, Bina Sosial dan Mitra Herdiana Anak	Dinas PIA	Jumlah Orang yang menerima bimbingan pembinaan negeri Jember Kabupaten, Akta Kabupaten, Bina Sosial dan Mitra Herdiana Anak Kabupaten/Kota	3 Orang	5.800.000
Pembelian Akta ke Layanan Pembinaan dan Kesehatan Dasar	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan Akta ke Layanan Pembinaan dan Kesehatan Dasar Keresnagan Kabupaten/Kota	25 Orang	8.060.000	Pembelian Akta ke Layanan Pembinaan dan Kesehatan Dasar	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan Akta ke Layanan Pembinaan dan Kesehatan Dasar Keresnagan Kabupaten/Kota	25 Orang	10.000.000
Pembelian Layanan Data dan Pengalihan	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengalihan Keresnagan Kabupaten/Kota	50 Orang	13.130.000	Pembelian Layanan Data dan Pengalihan	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengalihan Keresnagan Kabupaten/Kota	50 Orang	13.000.000

	Pemberian Layanan Kedarifatan	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Kecamatan Kabupaten/Kota	50 Orang	3.625.000	Pemberian Layanan Kedarifatan	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Kecamatan Kabupaten/Kota	0	
	Pemberian Layanan Pendidikan Keluarga	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Pendidikan keluarga Kecamatan Kabupaten/Kota	50 Orang	3.000.000	Pemberian Layanan Pendidikan Keluarga	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Pendidikan keluarga Kecamatan Kabupaten/Kota	50 Orang	12.000.000
	Pemberian Layanan Rutukan	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rutukan Kecamatan Kabupaten/Kota	4 Orang	5.000.000	Pemberian Layanan Rutukan	Dinas PIA	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rutukan Kecamatan Kabupaten/Kota	10 Orang	13.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMERIKSAAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Pemantauan Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Pemasaran Bantuan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>203.085.184</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Pemantauan Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Pemasaran Bantuan Sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>1.988.478.799</b>
	Pengalokasian data Saku rumah Cakupan Daerah Kab/ Kota	Dinas PIA	Pemantauan Capaian Pengalokasian data Saku rumah Cakupan daerah Kab/ Kota	100%	203.085.184	Pengalokasian Data Saku Rumah Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PIA	Pemantauan Capaian Pengalokasian data Saku rumah Cakupan daerah Kab/ Kota	100%	1.988.478.799
	Pemantauan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	Dinas PIA	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang diidentifikasi	94.987 Orang	77.843.181	Pemantauan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PIA	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang diidentifikasi	94987 Orang	241.074.840
	Pengalokasian Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PIA	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengalokasian Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	180 Keluarga	45.450.000	Pengalokasian Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PIA	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengalokasian Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	180 Keluarga	880.000.000
	Pembinaan Bantuan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Dinas PIA	Jumlah Keluarga Pembinaan Bantuan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	66 Keluarga	79.092.000	Pembinaan Bantuan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Dinas PIA	Jumlah Keluarga Pembinaan Bantuan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	531 Keluarga	805.404.204
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERANGKAS BENCARA</b>		<b>Pemantauan berbagai bencana yang menimbulkan masalah sosial selama masa tanggap darurat</b>	<b>100%</b>	<b>187.156.000</b>	<b>PROGRAM PERANGKAS BENCARA</b>		<b>Pemantauan berbagai bencana yang menimbulkan masalah sosial selama masa tanggap darurat</b>	<b>100 %</b>	<b>300.000.000</b>
	Pembinaan Perencanaan Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas PIA	Pembinaan Perencanaan Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	98.990.000	Pembinaan Perencanaan Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas PIA	Pembinaan Perencanaan Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	115.000.000

	Penyediaan Makanan	Dinas PSA	Jumlah Orang yang mendapatkan Perumahan 361 (dari dalam Masei Tersebut) dan Masei Tersebut (Pengembangan) Kecamatan Kabupaten/Kota	120 Orang	63.637.000	Penyediaan Makanan	Dinas PSA	Jumlah Orang yang mendapatkan Perumahan 361 (dari dalam Masei Tersebut) dan Masei Tersebut (Pengembangan) Kecamatan Kabupaten/Kota	120 Orang	63.637.000
	Penyediaan Sandang	Dinas PSA	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakisan dan Kebutuhan Lainnya yang terdistribusi pada Masei Tersebut (Pengembangan) dan Masei Tersebut (Pengembangan) Kecamatan Kabupaten/Kota	30 Orang	12.120.000	Penyediaan Sandang	Dinas PSA	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakisan dan Kebutuhan Lainnya yang terdistribusi pada Masei Tersebut (Pengembangan) dan Masei Tersebut (Pengembangan) Kecamatan Kabupaten/Kota	30 Orang	12.120.000
	Penyediaan Tempat Pemertajagan Pengingat	Dinas PSA	Jumlah Timpel Pengingat Kecamatan Kabupaten/Kota	1 Tim	15.150.000	Penyediaan Tempat Pemertajagan Pengingat	Dinas PSA	Jumlah Timpel Pengingat Kecamatan Kabupaten/Kota	1 Tim	15.150.000
	Peranginan Khusus bagi Kelompok Binaan	Dinas PSA	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemertajagan Khusus bagi Kelompok Binaan Kecamatan Kabupaten/Kota	5 Orang	3.000.000	Peranginan Khusus bagi Kelompok Binaan	Dinas PSA	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemertajagan Khusus bagi Kelompok Binaan Kecamatan Kabupaten/Kota	5 Orang	3.000.000
	Penyediaan Dukungan (Pelayanan)	Dinas PSA	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikologis Kecamatan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	Penyediaan Dukungan (Pelayanan)	Dinas PSA	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikologis Kecamatan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000
	Penyediaan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dinas PSA	Perencanaan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100%	58.176.000	Penyediaan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dinas PSA	Perencanaan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100%	58.176.000
	Kontribusi Binaan dan Pelayanan Tersebut Bagi Bencana	Dinas PSA	Jumlah Orang yang melaksanakan Kontribusi Binaan dan Pelayanan Tersebut Bagi Bencana Kecamatan Kabupaten/Kota	24 Orang	28.176.000	Kontribusi Binaan dan Pelayanan Tersebut Bagi Bencana	Dinas PSA	Jumlah Orang yang melaksanakan Kontribusi Binaan dan Pelayanan Tersebut Bagi Bencana Kecamatan Kabupaten/Kota	24 Orang	28.176.000
<b>5</b>	<b>PROGRAM PERLOLAAN TAMAN MAKAM PARILAWAN</b>		<b>Perawatan Pemeliharaan Taman Makam Parilawan Nasional</b>	<b>100%</b>	<b>18.623.895</b>	<b>PROGRAM PERLOLAAN TAMAN MAKAM PARILAWAN</b>		<b>Perawatan Pemeliharaan Taman Makam Parilawan Nasional</b>	<b>100%</b>	<b>18.623.895</b>
	Perawatan Pemeliharaan Taman Makam Parilawan Nasional Kabupaten/Kota		Perawatan Pemeliharaan Taman Makam Parilawan Nasional Kecamatan Kabupaten/Kota	100%	18.623.895	Perawatan Pemeliharaan Taman Makam Parilawan Nasional Kabupaten/Kota		Perawatan Pemeliharaan Taman Makam Parilawan Nasional Kecamatan Kabupaten/Kota	100%	18.623.895

	Penyuluhan Terencana dan Praktisitas, Tindakan Makam, Pelaksanaan Kemandirian Kabupaten/Kota	Dinas PSA	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan serta Penyuluhan Berencana dan Praktisitas Tindakan Makam Publikasi, Rekam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.000.000	Penyuluhan Tindakan Makam, Pelaksanaan Kemandirian Kabupaten/Kota	Dinas PSA	Jumlah Makam yang terpenuhi Tindakan Makam, Pelaksanaan Kemandirian/Kota	85,5 Makam	12.563.860	Penyuluhan Tindakan Makam, Pelaksanaan Kemandirian Kabupaten/Kota	Dinas PSA	Jumlah Makam yang terpenuhi Tindakan Makam, Pelaksanaan Kemandirian/Kota	85,5 Makam	30.000.000
6	<b>PROGRAM PERDAMUBUKAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>  Peningkatan Partisipasi Perempuan Gender (PGD) pada Lembaga Nemotasi Kemandirian Kab/Kota	Dinas PSA	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	30 Peringkat Daerah	20.200.000	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	30 Peringkat Daerah	20.200.000	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	30 Peringkat Daerah	30.000.000
	Penyuluhan Partisipasi Perempuan Gender (PGD) pada Lembaga Nemotasi Kemandirian Kab/Kota	Dinas PSA	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	30 Peringkat Daerah	20.200.000	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	30 Peringkat Daerah	20.200.000	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	30 Peringkat Daerah	30.000.000
	Penyuluhan Partisipasi Perempuan Gender (PGD) pada Lembaga Nemotasi Kemandirian Kab/Kota	Dinas PSA	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	30 Peringkat Daerah	20.200.000	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	30 Peringkat Daerah	20.200.000	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Adhukar Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	30 Peringkat Daerah	30.000.000

	Sosialisasi Pengabdian Masyarakat di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dilaksanakan PMA	Jumlah: Delapan kali Sosialisasi Pengabdian Masyarakat Pengabdian di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	100%	35.350.000	Sosialisasi Pengabdian Masyarakat Pengabdian di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dilaksanakan PMA	1	35.000.000
	Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat Penyedia Layanan Kesehatan, Kemandirian Kabupaten/ Kota	Dilaksanakan PMA	Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat Penyedia Layanan Kesehatan, Kemandirian Kabupaten/ Kota	100%	68.175.000	Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat Penyedia Layanan Kesehatan, Kemandirian Kabupaten/ Kota	Dilaksanakan PMA	100%	68.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Kesehatan, Kemandirian Kabupaten/ Kota	Dilaksanakan PMA	Jumlah: Lima kali Penyediaan Layanan Pengabdian Masyarakat Kemandirian Kabupaten/ Kota yang berdampak langsung dan tidak langsung	30 Layanan	65.850.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Kesehatan, Kemandirian Kabupaten/ Kota	Dilaksanakan PMA	30 Layanan	65.000.000

	Peningkatan Kemampuan Informasi dan Literasi (KID) Pemberdayaan Perempuan Kerasangkan Kabupaten/Kota yang terwujud	Dinas PIA	Jumlah Dukungan Komunitas Informasi dan Literasi (KID) Pemberdayaan Perempuan Kerasangkan Kabupaten/Kota yang terwujud	12.500.000		
7	<b>PROGRAM PENGURANGAN PERSEMPILAN</b> Peningkatan Kemampuan Terhadap Perempuan Linggih Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PIA	100 % Peningkatan Kemampuan Terhadap Perempuan Linggih Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	100 %	80.000.000
	Kemampuan dan keterampilan akademik, keterampilan Kritis, Program dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Terhadap Perempuan Linggih Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PIA	1 Dukungan Jumlah Dukungan Hasil Akademik dan Skill/Keahlian Akademik, Program dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Terhadap Perempuan Kerasangkan Kabupaten/Kota	80.000.000	100 %	80.000.000
8	<b>PROGRAM PERIBATAY KUALITAS KELUARGA</b> Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kerasangkan Gender (KID) dan Hak Anak Anak terhadap daerah Kab/ Kota	Dinas PIA	100 % Cakupan layanan nasaling keluarga	850.000.000	100 %	850.000.000
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kerasangkan Gender (KID) dan Hak Anak Anak terhadap daerah Kab/ Kota	Dinas PIA	100 % Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kerasangkan Gender (KID) dan Hak Anak Anak terhadap daerah Kab/ Kota	850.000.000	100 %	850.000.000
9	<b>PROGRAM PENERUSAHAR ANAK ANAK</b> Peningkatan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kerangka Kerasangkan Kab/ Kota	Dinas PIA	80 % Peningkatan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kerasangkan Kabupaten/Kota	178.860.928	80 %	193.860.928
	Peningkatan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kerangka Kerasangkan Kab/ Kota	Dinas PIA	42 Dukungan Jumlah Laporan Peningkatan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kerasangkan Kabupaten/Kota	193.860.928	80 %	193.860.928



	Perencanaan PMA pada Lembaga Pemberdayaan, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha/Kemasyarakatan Kab/ Kota	100 %	66.138.926	Perencanaan PMA pada Lembaga Pemberdayaan, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha/Kemasyarakatan Kab/ Kota	100 %	66.138.926	Perencanaan Perencanaan PMA pada Lembaga Pemberdayaan, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha/Kemasyarakatan Kab/ Kota
	Koordinasi dan Bekerjasama/ Pelaksanaan Perencanaan Pemberdayaan Anak Kewirausahaan Kab/ Kota	1 Dukumen	66.860.290	Koordinasi dan Bekerjasama/ Pelaksanaan Perencanaan Pemberdayaan Anak Kewirausahaan Kabupaten/ Kota	1 Dukumen	66.860.290	Jumlah Dukumen Hasil Koordinasi dan Bekerjasama/ Pelaksanaan Perencanaan Pemberdayaan Anak Kewirausahaan Kabupaten/ Kota
	Penggiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan/ Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kab/ Kota	100 %	108.799.240	Penggiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan/ Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/ Kota	100 %	127.722.020	Perencanaan Penggiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan/ Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kab/ Kota
	Pengyukutan Layanan/ Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kab/ Kota	47 Orang	43.143.240	Pengyukutan Layanan/ Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/ Kota	47 Orang	43.143.240	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan/ Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/ Kota
	Koordinasi dan Bekerjasama/ Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergiat Daerah	12 Dukumen	45.380.000	Koordinasi dan Bekerjasama/ Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergiat Daerah Kabupaten/ Kota	12 Dukumen	45.380.000	Jumlah Dukumen Hasil Koordinasi dan Bekerjasama/ Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/ Kota
	Koordinasi dan Bekerjasama/ Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergiat Daerah	1 Dukumen	20.300.000	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergiat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dukumen	20.300.000	Jumlah Dukumen Koordinasi dan Bekerjasama/ Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergiat Daerah Kabupaten/ Kota
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KURUS ANAK	100%	60.600.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KURUS ANAK	100%	249.111.350	Perencanaan Penggiatan dan Bekerjasama/ Pelaksanaan yang dituangkan

9.	<p>Penyediaan, Ketersediaan, dan Aksesibilitas layanan yang disediakan untuk anak yang memiliki permasalahan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>
10.	<p>Penyediaan, Ketersediaan, dan Aksesibilitas layanan yang disediakan untuk anak yang memiliki permasalahan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota</p>

Kerjasama dan Kolaborasi Perencanaan Kapasitas Subsidi Opsy Lembaga Pelayanan Layanan Anak yang membutuhkan perhatian khusus singkat daerah Kabupaten/Kota	Direksi PDA	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Kapasitas Subsidi Daya Lembaga Pelayanan Anak yang membutuhkan perhatian khusus singkat daerah Kabupaten/Kota	13.150.000					
<b>11 PROGRAM PENJAJAR URBAN KEMERDEKAAN</b> Perencanaan, Pengorganisasian dan Evaluasi Kinerja Pusat/daerah Pelayanan dan Perencanaan Persejahteraan	Direksi PDA	Jumlah RUP Khusus Anak	4.921.942.923	B	100 %	18.180.000	Pengembangan ICE (kemampuan, informasi, dan efikasi) perencanaan khusus sangat singkat daerah Kabupaten/Kota	5.189.225.000
Kerjasama dan Perencanaan Laporan Pelayanan dan Perencanaan Persejahteraan	Direksi PDA	Jumlah Dokumen RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	6.090.000	B	100 %	6.090.000	RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	8.189.225.000
Kerjasama dan Perencanaan Laporan Pelayanan dan Perencanaan Persejahteraan	Direksi PDA	Jumlah Dokumen RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	6.090.000	B	100 %	6.090.000	RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	8.189.225.000
Kerjasama dan Perencanaan Laporan Pelayanan dan Perencanaan Persejahteraan	Direksi PDA	Jumlah Dokumen RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	6.090.000	B	100 %	6.090.000	RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	8.189.225.000
Kerjasama dan Perencanaan Laporan Pelayanan dan Perencanaan Persejahteraan	Direksi PDA	Jumlah Dokumen RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	6.090.000	B	100 %	6.090.000	RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	8.189.225.000
Kerjasama dan Perencanaan Laporan Pelayanan dan Perencanaan Persejahteraan	Direksi PDA	Jumlah Dokumen RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	6.090.000	B	100 %	6.090.000	RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	8.189.225.000
Kerjasama dan Perencanaan Laporan Pelayanan dan Perencanaan Persejahteraan	Direksi PDA	Jumlah Dokumen RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	6.090.000	B	100 %	6.090.000	RUP dan Laporan Kelembagaan dan Perencanaan Persejahteraan	8.189.225.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemangangan Bangunan Kantor	Dinas PSA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pemangangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	1.063.160	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemangangan Bangunan Kantor	Dinas PSA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pemangangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	1.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PSA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	44.378.474	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PSA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	80.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas PSA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	6.060.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas PSA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	8.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PSA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	20.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PSA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PSA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	7.474.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PSA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	28.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PSA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	100.293.926	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PSA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	170.000.000
Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD	Dinas PSA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	11.110.000					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	36.360.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	130.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PSA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	36.360.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PSA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	15 Unit	120.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	345.940.354	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	385.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PSA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	17.003.754	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PSA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	19.500.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Urusi Kantor	Dinas PSA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusi Kantor yang disediakan	12 Laporan	328.936.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusi Kantor	Dinas PSA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusi Kantor yang disediakan	12 Laporan	365.500.000,00

Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Dinas Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Dinas Pemerintahan Daerah	100%	34.900.000	Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	64.325.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jalanan	Dinas PSA	Jumlah Kendaraan Perseorangan Dinas atau kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	29.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jalanan	Dinas PSA	Jumlah Kendaraan Perseorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	55.525.000,00
Pembelian Perlatan dan Mesin Lainnya	Dinas PSA	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	13 Unit	5.000.000	Pembelian Perlatan dan Mesin Lainnya	Dinas PSA	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 Unit	8.800.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>7.305.750.309</b>					<b>10.650.929.273</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sesuai dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Adapun Program Nasional pada Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi dasar dalam penyusunan Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

A. Urusan Sosial dengan program sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan kualitas keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak
5. Program Perlindungan Khusus Anak

Visi dan misi Kota Pematang Siantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah **"Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas"**

Yang dimaksud dengan :

1. **Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.
2. **Sejahtera** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi

dan kelijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

3. **Berkualitas** Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kelijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Pemerintah Kota Pematang Siantar, sebagai berikut:

1. Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.

Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar.

Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional.

3. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.



Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Pematang Siantar sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada satu tahun mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 adalah Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Dan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka disusunlah beberapa sasaran.

Tujuan sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2022-2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang dibantu kebutuhan dasarnya	1. Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar parti 1.2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana
			2. Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	2.1 Persentase Validasi dan validasi data calon penerima bantuan

3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak serta peran perempuan dalam pembangunan	Indeks pembangunan Gender	1. Meningkatkan kualitas kebijakan Pengrusutaman Gender termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PRG)	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD
			2. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan
			3. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara kegiatan adalah tindakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dengan program yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan instansi pula diidentifikasi keterkaitan antara kebijakan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar adalah menyusun pelaksanaan program pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melakukan tugas yang dimaksud maka penting kiranya menetapkan rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran tahun 2024 serta perkiraan maju tahun anggaran 2025 yang pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematang Siantar dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut :

**TABEL T.C.33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025**  
**KOTA PEMATANG SIANTAR**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kode	Uraian/Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakirasan Maju Rencana Tahun 2025	
			4	5	6	7		8	9
			Lebas	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR				10.650.939.373				7.571.000.708
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.650.939.373				7.571.000.708
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.263.626.773				1.458.452.406
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PKKS (Pekerja Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif		55 %	340.250.000			60	383.313.407
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100 %	340.250.000			100	383.313.407
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kemungkinan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kemungkinan Kabupaten/Kota		Dinon P3A					
1	02	01		23 orang	170.250.000	DAU		33	103.380.754

Kode	Uraian/Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tabung Resonansi)					Catatan Penting	Pembinaan Kerja Bersama Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	8		9	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Pemroses Terapan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Direvisi PMA	339 orang	170.000.000	DAU		239	379.922.633		
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Perencanaan Capaian SPM Bidang Sosial		100 %	1.611.897.974			100 %	696.706.069		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Odlok/Orang Pingsan di Luar Panti Sosial	Perencanaan Peningkatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Odlok/Orang Pingsan di luar panti sosial	Direvisi PMA	100 %	1.811.897.974			100 %	698.706.069		
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan Kelurahan Perumahan Sesuai dengan Standar Ots Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Direvisi PMA	290 Orang	354.060.000	DAU		610 Orang	361.176.606		
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakian dan Kelengkapan Lainnya yang Terwadai dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Direvisi PMA	290 Orang	183.000.000	DAU		610 Orang	186.678.300		

Kode	Urusan/Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Revisi)					Catatan Penting	Problema Maja Beres Tahun 2025	
			4	5	6	7	8		9	10
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.06.04.2.01.03	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dusun PJA	35 Orang	1.80.000.000	DAU		40 Orang	96.275.813	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Berkebutuhan Khusus	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Berkebutuhan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dusun PJA	5 Orang	7.500.000	DAU		10 Orang	4.500.450	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Psik. Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Psik. Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dusun PJA	350 Orang	841.837.974	DAU		610 Orang	12.341.200	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kermertan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kermertan Kabupaten/Kota	Dusun PJA	50 Orang	15.000.000	DAU		610 Orang	4.500.450	

Kode	Gussein/Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Problema Maja Rencana Tahun 2020	
			4	5	6	7	8		9	10
1 06 04 2 01 07	Penyediaan Pemeliharaan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemeliharaan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Masyarakat Kabupaten/Kota	Dinas P3A	5 Orang	5.000.000 DAU	DAU		5 Orang	1.500.000	
1 06 04 2 01 08	Pembelian Akta ke Layanan Pendaftaran dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akta ke Layanan Pendaftaran dan Kesehatan Dasar Kecamatan Kabupaten/Kota	Dinas P3A	25 Orang	10.000.000	DAU		25 Orang	8.100.000	
1 06 04 2 01 09	Pembelian Layanan Data dan Pendaftaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pendaftaran Kecamatan Kabupaten/Kota	Dinas P3A	50 Orang	15.000.000	DAU		50 Orang	13.261.000	
1 06 04 2 01 11	Pembelian Pelayanan Pendaftaran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pendaftaran Keluarga Kecamatan Kabupaten/Kota	Dinas P3A	50 Orang	15.000.000	DAU		50 Orang	5.100.500	
1 06 04 2 01 12	Pembelian Layanan Bujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Bujukan Kecamatan Kabupaten/Kota	Dinas P3A	10 Orang	15.000.000	DAU		4 Orang	5.100.500	
1 06 06	PROGRAM PERLINDUNG DAN JAMBAH SOSIAL	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Cakupan pemirsa Bantuan Sosial	Dinas P3A	100 %	1.986.478.799			100 %	205.116.036	

Kode	Uraian / Bidang	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Praktis Maju Rencana Tahun 2025
			4	5	6	7		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Dinas P3A	100%	1.986.478.799		100%	305.116.036
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Dinas P3A	94987 Orang	241.074.840	DAU	94987 Orang	78.419.610
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantunan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dinas P3A	2006 Keluarga	850.000.000	DAU	2006 Keluarga	43.904.800
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kewajibannya Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kewajibannya Keluarga Keseluruhan Kabupaten/Kota	Dinas P3A	831 keluarga	805.404.350	DAU	831 Keluarga	80.791.920
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BERCAKUPA</b>	<b>Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</b>	<b>Dinas P3A</b>	<b>100 %</b>	<b>300.000.000</b>		<b>100 %</b>	<b>198.727.660</b>
1.06.06.2.04	Perencanaan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perhitungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas P3A	100%	113.000.000		100%	99.969.800

Kode	Organisasi/Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting		Pembinaan Monev Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Persekitan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pencegahan) Kecamatan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	120 Orang	65.000.000	DAU		120 Orang	64.265.300		
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sediaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Paksaan dan Kelengkapan lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pencegahan) dan Pencegahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	30 Orang	25.000.000	DAU		30 Orang	12.241.200		
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penyampungan Penelitian	Jumlah Tempat Penyampungan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	1 Unit	15.000.000	DAU		1 Unit	15.301.300		
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	5 Orang	5.000.000	DAU		5 Orang	3.060.300		
1.06.06.2.01.05	Penyediaan Dukungan Pado-ahad	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	10 Orang	5.000.000	DAU		10 Orang	5.100.500		



Kode	Urusan/Bidang  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pembekalan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100 %	185.000.000			100 %	58.757.760
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas P3A	24 Orang	185.000.000	DAU		24 Orang	58.757.760
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Dinas P3A	100 %	25.000.000			100 %	12.689.534
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		100%	25.000.000			100%	12.689.534
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan	855 Makam		DAU		855 Makam	12.689.534
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			1.227.987.500				1.141.365.592

Kode	Uraian/Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 06	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				1.227.987.800				1.141.265.592
2 06 02	PROGRAM PENGABUHAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				178.015.218			36,00 Indeks	178.833.021
2 06 02 2 01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kecamatan/Kota	Indeks Pembangunan Gender			178.015.218			100 %	178.833.021
2 06 02 2 01 03	Advokasi kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kecamatan/Kota	Dusun PLA		20.000.000	DAU		3,3 Peringkat Daerah	20.462.000

Kode	Uraian/Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Tingkat Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	8		9	Tingkat Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2 06 02 2 01 04	Realisasi Kegiatan Pelaksanaan PUJ Termasuk PPO	Jumlah Peningkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kelakuan Pelaksanaan Pengorganisasian Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Berpasang Gender (PPBG) Kecamatan Kabupaten/Kota	3	Dinas P3A	33 Peningkat Daerah	53.318.210	DAU		33 Peningkat Daerah	53.310.771	
2 06 02 2 02	Pembelajaran Peningkatan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan Kabupaten/Kota	Peningkatan Perbedaannya Peningkatan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan Kabupaten/Kota		Dinas P3A	100 %	55.000.000			100 %	35.703.800	
2 06 02 2 02 01	Realisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dukungan Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kecamatan Kabupaten/Kota		Dinas P3A	1 Dukumen	35.000.000	DAU		1 Dukumen	35.703.800	
2 06 02 2 03	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Kabupaten/Kota	Peningkatan Partisipasi dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Kabupaten/Kota			100 %	67.860.000			100 %	68.856.750	

Kode	Gruasus/Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prkiraan Maja Beresasa Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Paga Indikatif (Rp)	Sumber Dana	8		9	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Paga Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2 08 02 2 03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelenggara Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyelenggara Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Dinas P3A	20 Lembaga	55.000.000	DAU		20 Lembaga	55.105.500		
2 08 02 2 03 06	Pengembangan Komunitas Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Informasi & Edukasi Perempuan (Pusat) yang terbentuk di kab./kota	Dinas P3A	12 Dokumen	12.500.000	DAU		12 Dokumen	12.751.250		
2 08 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan</b>		<b>100 %</b>	<b>60.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>61.206.000</b>		
2 08 03 2 01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingskup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggabihan Korban Terhadap Perempuan Lingskup Daerah Kabupaten/Kota		100 %	60.000.000			100 %	61.206.000		
2 08 03 2 01 01	Koordinasi dan Bimbingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingskup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Dinas P3A	1 Dokumen	60.000.000	DAU		1 Dokumen	61.206.000		
2 08 04	<b>PROGRAM PERSINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Cakupan layanan konseling keluarga</b>		<b>100 %</b>	<b>550.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>663.045.000</b>		

Kode	Urusan/Bidang  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2 04 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota		100 %	550.000.000			100 %	663.065.000
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	42 Dokumen	550.000.000	DAU		42 Dokumen	663.065.000
3 08 06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase keturutan rumah anak</b>		<b>90 %</b>	<b>193.860.926</b>			<b>90%</b>	<b>177.366.531</b>
2 08 00 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Dinas PSA	100 %	66.138.906			100 %	67.468.298
2 04 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PSA	1 Dokumen	66.138.906	DAU		1 Dokumen	67.468.298
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Dinas PSA	100 %	127.722.020			100 %	109.887.233

Kode	Grossan/Bidang	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Bab Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Keuangan)				Catatan		Pembinaan Manaj. Keuangan Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Peng. Indikatif (Rp.)	Bentuk Dana	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.06	2.02.01	2.02.01	Dinas PSA	47 Orang	42.722.000	DAU		47 Orang	42.580.713
2.08.06	2.02.02	2.02.02	Dinas PSA	12 Dukungan	65.000.000	DAU		12 Dukungan	38.705.800
2.08.06	2.02.03	2.02.03	Dinas PSA	1 Dukungan	30.000.000	DAU		1 Dukungan	30.602.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KEHUTAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KEHUTAN ANAK	Dinas PSA	100 %	249.111.359			100 %	61.206.000
2.08.07	2.01	2.01	Dinas PSA	100 %	100.000.000			100 %	100.000.000

Kode	Uraian/ Bidang	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tabung Rencana)				Catatan Penting	Profilan Majo Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 06 07 2 01 03	Penggiatan kerja sama lintas pemerintah daerah untuk meningkatkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DTPPA	Jumlah kegiatan penrengahan KIA respada	Dinas PSA	6 Kegiatan	100.000.000	DAU		6 Kegiatan	100.000.000
2 08 07 2 02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	Dinas PSA	100 %	90.000.000			100 %	90.000.000
2 08 07 2 03 06	Koordinasi Pihak manuar Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Dinas PSA	300 Orang	90.000.000	DAU		300 Orang	90.000.000
2 08 07 2 03	Pengantar dan Pengembangan Lembaga Penyelidid Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Capaian Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyelidid Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota		100 %	59.111.359			100 %	59.111.359
2 08 07 2 03 07	Pengembangan KIE himmatitas, indikator, dan elukasi perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perindidangan khusus anak	Dinas PSA	1 Dokumen	59.111.359	DAU		1 Dokumen	59.111.359

Kode	Urusan / Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Proyeksi Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 01	PROGRAM PERUBAHAN URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah	55 %	8.159.325.000				55 %	4.971.182.890
1 06 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengabdian Administrasi Keuangan	100 %	4.250.000.000				100 %	4.335.425.000
1 06 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,3 orang	4.250.000.000	DAU			3,3 orang	4.335.425.000
1 06 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengabdian Administrasi Keuangan Umum	100%	330.000.000				100%	184.801.280
1 06 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Elektrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	7.000.000	DAU			12 Paket	4.610.816
1 06 01 2 06 02	Penyediaan Perbaikan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	80.000.000	DAU			12 Paket	44.822.269
1 06 01 2 06 03	Penyediaan Perbaikan Rumah Tinggal	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tinggal yang disediakan	12 Paket	9.500.000	DAU			12 Paket	6.120.600
1 06 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	10.500.000	DAU			12 Paket	7.548.740
1 06 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengabdian yang disediakan	12 Paket	53.000.000	DAU			12 Paket	20.402.000
1 06 01 2 06 09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	170.000.000	DAU			90 Laporan	101.256.865



Kode	Urusan/Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting		Prakiraan Moju Rencana Tahun 2025
			4	5	6	7	8	9	10	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
1 06 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ditawa PSA	100%	130.000.000				100%	36.723.600
1 06 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		15 Unit	130.000.000	DAU			15 Unit	36.723.600
1 06 01 2 08	Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ditawa PSA	100%	385.000.000				100%	349.399.960
1 06 01 2 08 02	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Ditawa PSA	12 Laporan	19.500.000	DAU			12 Laporan	17.173.792
1 06 01 2 08 04	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Ditawa PSA	12 Laporan	365.500.000	DAU			12 Laporan	332.226.168
1 06 01 2 09	Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ditawa PSA	100%	64.025.000				100%	55.349.811
1 06 01 2 09 01	Persediaan Jasa Pembelian, Biaya Pembelian, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelbaya dan dibayarkan pagoknya	Ditawa PSA	4 Unit	55.525.000	DAU			4 Unit	50.149.311
1 06 01 2 09 02	Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelbaya	Ditawa PSA	13 Unit	8.500.000	DAU			13 Unit	5.100.900

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta Renstra.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun pada Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun 2024 ini sudah mempertimbangkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2022 – 2027 serta isu – isu strategis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dengan dibuatnya Rencana Kerja Tahun 2024, diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 lebih terarah, karena sudah disusun arah yang menjadi acuan, dengan demikian diharapkan lebih tepat guna dan tepat sasaran baik dalam hal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dalam hal pembiayaan maupun pencapaian target kinerja serta serapan anggaran.

Pematang Siantar,

2023

Plt. Kepala Dinas Sosial P3A  
Kota Pematang Siantar



MHD. Hamdan Lubis, SH

NIP.197910272000031002